

KEBIJAKAN PEMERINTAHAN JOKOWI TERKAIT TENAGA KERJA INDONESIA DI MALAYSIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUBUNGAN DUA NEGARA SERUMPUN

Ali Maksum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

E-mail: ali.maksum@fisipol.umy.ac.id

Abstract: In 2014 Indonesian Presidential Election, Joko Widodo promised to give a priority in the issue of Indonesian migrant workers, especially in Malaysia. This was basically part of Jokowi's program to protect Indonesian citizens abroad. In Malaysia, Indonesian migrant workers have involved into various problems and cases. Therefore, this article attempts to examine Jokowi's administration related to Indonesian migrant workers in Malaysia and its impact to both countries bilateral relations. Both countries obviously gained many advantages from the influx of Indonesian migrant workers in Malaysia. The migrant workers remittance is one of the largest revenue for Indonesian government. As for Malaysia, the presence of Indonesian migrant workers highly contributed to the national economy amid lack of interest of Malaysian citizens to such kind of "dirty jobs." Hence, this article invites readers into the comprehensive discussion on migrant workers issue and Indonesia-Malaysia relations, especially during the first half of Jokowi's tenure of the office.

Kata-kata Kunci: tenaga kerja; negara serumpun; moratorium; hubungan bilateral

Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia

Isu tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia seakan tidak ada habisnya di saat kesempatan kerja di Indonesia sangat terbatas. Bekerja di luar negeri termasuk di Malaysia menjadi pilihan menarik sebagian pencari kerja di Indonesia. Dalam hal ini negara juga diuntungkan dengan keberadaan TKI karena menjadi salah satu penyumbang devisa negara melalui pengiriman uang (*remittance*). Tentu saja, isu TKI juga menyangkut persoalan hubungan bilateral Indonesia-Malaysia yang selalu sensitif. Tidak bisa dinafikan, sebagian masyarakat Indonesia beralasan bahwa bekerja dan hidup di

Malaysia merupakan “tradisi merantau” yang sudah ada jauh sebelum kedua negara terbentuk.¹ Malaysia juga tidak melihat kedatangan orang-orang Indonesia sebagai ancaman atau pesaing karena serumpun.² Tujuan merantau ke Malaysia tidak lain adalah mencari penghidupan yang lebih baik. Bahkan, sudah menjadi rahasia umum bahwa para pendatang Indonesia sangat penting posisinya untuk “memperkuat” posisi politik etnis Melayu melalui Partai *United Malays National Organization* (UMNO) khususnya pasca kerusuhan antar etnis tahun 1969.³

Faktor keserumpunan tampaknya menjadi elemen penting mudahnya pendatang Indonesia diterima di Malaysia akibat adanya kesamaan agama dan budaya. TKI juga dikenal rajin bekerja, ulet, tekun dan pekerja keras dibanding pekerja negara lain.⁴ Harus diakui, awalnya sebagian besar TKI bekerja secara profesional dan di sektor formal. Namun, akhirnya TKI juga menguasai sektor lain bahkan menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi Malaysia terutama di tiga sektor utama yang dikenal dengan *3D* (*dirty, dangerous and difficult*)⁵. Para TKI juga mulai tersangkut masalah termasuk isu membanjirnya TKI ilegal. Berdasarkan catatan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, tahun 2012 saja diperkirakan ada dua juta warga Indonesia yang bekerja di Malaysia di mana separuh jumlah tersebut diduga ilegal.⁶

Dalam konteks ini, wajar jika pemerintah Malaysia semakin khawatir dengan dampak yang ditimbulkan dari meningkatnya jumlah imigran terutama dari Indonesia. Hal ini tidak lain didasari oleh beberapa alasan yang mendesak untuk segera menangani pekerja Indonesia secara serius. Misalnya sebagian TKI ada yang terlibat kriminal dan mengganggu ketertiban masyarakat. Tahun 1987 saja, dari 36% narapidana di penjara-penjara Malaysia adalah pendatang dari Indonesia.⁷ Pada perkembangan berikutnya, TKI juga terlibat kerusuhan misalnya di sebuah penjara di Semenyih, negara bagian Selangor yang menyebabkan seorang polisi tewas dan sejumlah TKI cedera. Di rumah tahanan imigrasi Machap Umboo, negara bagian Melaka dan di penjara Pekan Nenas, Pontian, negara bagian Johor serta di Nilai, negara Negeri Sembilan. Kesemuanya melibatkan kontak fisik antara TKI dengan aparat keamanan Malaysia. Hasilnya, kerajaan Malaysia bereaksi keras dan mengancam akan memulangkan seluruh pekerja Indonesia. Sehingga lahir kebijakan yang dikenal dengan “*Hire Indonesians Last*” atau pekerja pilihan terakhir.⁸

Pada saat yang sama, kasus demi kasus yang menimpa TKI di Malaysia juga semakin meningkat. TKI sektor non-formal seperti pembantu rumah tangga adalah golongan yang paling rawan tertimpa berbagai kasus. Misalnya perkosaan, tempat tinggal yang tidak layak, eksploitasi dan lain sebagainya.⁹

Isu TKI di Malaysia juga semakin rumit dengan munculnya istilah “Indon” yang sangat familiar di Malaysia dalam setiap narasi melibatkan TKI.¹⁰ Media di Malaysia juga tidak segan menyebut TKI sebagai “*troublemaker*”.¹¹ Artinya, citra TKI di Malaysia juga semakin negatif dan seringkali kontribusinya tidak ditonjolkan. Sebaliknya, gambaran negatif tentang TKI selalu muncul di mata masyarakat Malaysia.¹² Namun kebijakan pemerintah Malaysia yang represif ternyata juga mendapat tantangan dari sebagian kelompok di Malaysia. Beberapa organisasi non-pemerintah (*non-governmental organization, NGO*) seperti Suara Rakyat Malaysia (SUARAM) dan Tenaganita mengkritik keras kerajaan Malaysia yang dinilai melanggar hak asasi manusia. NGO tersebut juga menuduh dan percaya bahwa terjadinya beberapa kerusuhan adalah akibat provokasi aparat keamanan terutama polisi.¹³

Dampaknya tentu saja, isu TKI selalu memanaskan hubungan kedua negara akibat tindakan sebagian aparat dan masyarakat di Malaysia yang dinilai sewenang-wenang. Hal ini juga dilatarbelakangi oleh sikap sebagian warga Malaysia yang cenderung “merendahkan” warga Indonesia, terlebih TKI. Di sisi lain, TKI dituntut untuk melengkapi segala keperluan dokumentasi agar tidak menjadi ilegal. Keberadaan TKI pada dasarnya juga tidak bisa dipandang dari sudut negatif saja. Bahkan TKI juga melakukan upaya-upaya menaikkan citra positif di mata masyarakat Malaysia. Banyak di antara TKI yang akhirnya berinisiatif mendirikan organisasi untuk mewadahi aspirasi dan melakukan kegiatan positif, misalnya sosial-keagamaan hingga olahraga. Tampaknya, salah satu faktor penting mengapa mereka tergerak melakukan hal tersebut tidak lain adalah dampak dari reformasi tahun 1998 terkait kebebasan berorganisasi di Indonesia.¹⁴ Bahkan dengan berbagai agenda positif tersebut secara tidak langsung juga memainkan peran sebagai jalur diplomasi kedua (*second track diplomacy*) yang sangat penting. Oleh karena itu, penelitian ini dianggap penting karena permasalahan TKI sangat kompleks dan berdampak langsung kepada hubungan bilateral Indonesia-Malaysia.

Dinamika Permasalahan TKI di Era Jokowi

Membicarakan isu TKI dan hubungan Indonesia-Malaysia era Presiden Jokowi, maka perlu dibahas beberapa aspek yang sangat berkaitan satu sama lain. Setidaknya ada tiga elemen yang perlu dijabarkan, yaitu kebijakan pemerintah Jokowi terkait TKI khususnya di Malaysia, beberapa kasus yang melibatkan TKI di Malaysia dan implikasinya terhadap dinamika hubungan Indonesia-Malaysia.

Gambaran Umum Kebijakan Presiden Jokowi Terkait TKI di Malaysia

Secara umum kondisi dan dinamika permasalahan TKI di Malaysia tampaknya tidak berubah. Hal ini bisa dilihat dari berbagai kasus yang melibatkan TKI masih terus terjadi terutama kasus penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga asal Indonesia. Artinya, dinamika TKI di Malaysia era pemerintahan Jokowi masih menjadi isu klasik yang mau tidak mau akan menjadi sorotan masyarakat. Secara tidak langsung isu TKI juga akan berdampak pada dinamika hubungan Indonesia dengan negara jiran Malaysia.

Ketika masa kampanye Pemilihan Presiden 2014, calon Presiden Jokowi melontarkan beberapa isu terkait TKI secara umum, terutama masalah perlindungan warga negara Indonesia (WNI). Dalam visi-misinya, pasangan Jokowi-Jusuf Kalla dinilai lebih komprehensif dalam menanggapi isu TKI termasuk di Malaysia. Tidak heran salah satu NGO yang peduli dengan masalah-masalah buruh migran yaitu *Migrant Care* sangat mengapresiasi gagasan capres Jokowi-JK. Menurut *Migrant Care* dalam sebuah Siaran Persnya menyatakan bahwa:

“Dengan pembacaan kritis terhadap visi-misi mengenai perlindungan buruh migran Indonesia, harus diakui bahwa agenda perlindungan buruh migran yang diajukan oleh pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla lebih komprehensif dibandingkan pasangan Prabowo Subianto – Hatta Rajasa.”¹⁵

Hal jelas apa yang diutarakan *Migrant Care* menunjukkan apresiasi yang tinggi kepada Presiden Jokowi bahkan sejak awal masa kampanye. Sedangkan dalam menilai pasangan lain yaitu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, *Migrant Care* menilai bahwa:

“Prabowo Subianto mulai nimbrung pada bulan September 2013 (terkait kasus yang menimpa TKI Wilfrida di Malaysia). Jadi bisa dikatakan, keterlibatan Prabowo Subianto di tikungan terakhir saja.”¹⁶

Faktanya, kebijakan Presiden Jokowi berkebalikan dengan visi-misi kampanye yang berkomitmen memperjuangkan kehidupan TKI. *Migrant Care* yang sangat mengapresiasi visi-misi Jokowi berbalik arah karena merasa kecewa dengan rencana penghentian program pengiriman TKI ke luar negeri pada tahun 2017. Bukti keseriusan pemerintah untuk menghentikan program pengiriman TKI ke luar negeri khususnya sektor pembantu rumah tangga sebagaimana penegasan Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri bahwa:

“Pada tahun 2017, diharapkan Indonesia tidak lagi mengirimkan tenaga kerja sektor informal atau pembantu rumah tangga ke luar negeri.”¹⁷

Tentu saja *Migrant Care* bereaksi keras dengan mengatakan bahwa kebijakan tersebut:

“Sangat bertentangan dengan janji kampanye Presiden Joko Widodo dalam kampanyenya ... penghentian pengiriman TKI informal ke luar negeri sangat diskriminatif.”¹⁸

Sikap pemerintah Jokowi jelas menimbulkan semacam ketidakpuasan di kalangan TKI yang berharap masih bisa bekerja di luar negeri sebagai TKI. Tidak dipungkiri bahwa kebijakan tersebut hanya sebatas retorika belaka mengingat negara jelas belum siap menerima segala konsekuensi dari penghentian pengiriman TKI tersebut. Jika kebijakan penghentian TKI benar-benar diimplementasikan, maka yang menjadi pertanyaan pertama adalah terkait dengan nasib para TKI tersebut di tengah terbatasnya lowongan pekerjaan. Negara juga dilihat tidak memiliki upaya konkret serta terobosan dalam rangka pembukaan lapangan pekerjaan secara masif agar masyarakat tidak perlu pergi jauh ke luar negeri untuk menafkahi diri dan keluarganya.

Terkait dengan isu penghentian pengiriman TKI, para “pahlawan devisa” menanggapinya beragam. Salah seorang tokoh TKI di Malaysia mengatakan bahwa jika rencana pemerintah tersebut dilaksanakan maka:

“Jika kebijakan ini rasional kita dukung ... tapi jangan marah nyamuk kelambu dibakar.”¹⁹

Pernyataan di atas menunjukkan sebuah harapan sekaligus “peringatan” kepada pemerintah terkait rencana kebijakan penghentian pengiriman TKI. Peringatan tersebut bisa diartikan bahwa para TKI sebenarnya sadar dengan segala keterbatasan dan kondisi bekerja di luar negeri. Kebijakan tersebut masih menyisakan banyak tanda tanya terutama nasib mereka pasca penghentian, karena mereka juga sadar bahwa nasib dan hasil yang didapatkan selama ini di luar negeri mungkin masih lebih baik dibanding rekan-rekan mereka di tanah air. Belum lagi, rata-rata juga tahu betul bahwa pemerintah belum bisa menyediakan lapangan pekerjaan secara layak. Artinya, mereka pesimis dengan kebijakan penghentian pengiriman TKI ke luar negeri. Rasa pesimisme tersebut sebagaimana diungkapkan oleh salah satu TKI dalam narasi berikut:

“Bagaimana bisa bekerja di negeri sendiri? Aku hanyalah lulusan SMK? Sedangkan di Indonesia sarjana saja banyak yang menganggur.”²⁰

Dalam kesempatan yang lain, seorang TKI yang sudah cukup lama tinggal dan bekerja di Malaysia mengatakan bahwa rencana pemerintah menghentikan pengiriman TKI terkesan mendadak dan tidak melalui kajian mendalam. Hal ini disebabkan permasalahan TKI yang cukup kompleks dan

tidak bisa diselesaikan hanya dengan menghentikan pengiriman. Perlu banyak strategi dan langkah sebelum melakukan penghentian pengiriman TKI, misalnya terkait kesiapan lapangan pekerjaan serta solusi bagi mereka yang akan kembali ke tanah air dengan kehidupan baru dan dimulai dari titik nol. Dalam sebuah wawancara dengan seorang TKI yang sudah cukup “mapan” di Malaysia menyatakan:

“Langkah pemerintah tersebut justru menunjukkan kelemahan pemerintah sendiri yang tidak bisa mengatasi berbagai masalah dengan baik termasuk terkait isu TKI di luar negeri.”²¹

Pernyataan di atas jelas menunjukkan bahwa meskipun berbagai upaya sudah dilakukan untuk meyakinkan bahwa ada solusi untuk membuka lapangan pekerjaan, namun realitas di lapangan memang masih belum bisa dirasakan secara nyata. Fakta bahwa para pemuda-pemudi Indonesia sangat sulit mencapai pekerjaan adalah sebuah masalah yang harus segera dicarikan jalan keluar. Artinya, sampai hari ini bekerja menjadi TKI di luar negeri masih menjadi sebuah solusi sebagian masyarakat Indonesia. Apalagi mereka yang sudah menjalani profesi tersebut bertahun-tahun lamanya.²² Oleh karena itu, munculnya berbagai masalah juga tidak lepas dari banyaknya jumlah TKI yang berada di luar negeri ditambah dengan peliknya proses, mulai pra-keberangkatan hingga tiba di tanah air. Faktanya, masih banyak aparat dan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab memanfaatkan “kelemahan” TKI demi mencari keuntungan sesaat, sehingga tidak mengherankan hal ini memicu masifnya perdagangan manusia dengan berbagai cara dan strategi.²³

Sementara dari sisi regulasi, pemerintahan Jokowi masih merujuk kepada Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Selain itu, pemerintahan Jokowi juga berinisiatif untuk melakukan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN). Terkait dengan revisi ini, orientasi pemerintah masih bersifat birokratis dengan berencana membentuk Atase Ketenagakerjaan untuk melindungi TKI di sebuah negara tujuan. Sampai saat ini proses revisi juga masih dalam proses dan belum jelas arahnya.²⁴ Namun banyak TKI mengapresiasi kinerja Jokowi yang menghapus peraturan yang selama ini menyulitkan TKI yaitu perlunya memiliki Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN).²⁵ Meskipun demikian, pasca penghapusan KTKLN nasib TKI tetap tidak berubah. Para TKI masih diperas dan diperlakukan buruk oleh aparat negara meskipun sudah memiliki KTKLN sebagaimana narasi berikut:

“Petugas Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI) Dumai mencegah tangkal dan menolak Buruh Migran Indonesia di Pelabuhan Dumai hanya karena tak memiliki KTKLN. Buruh migran yang dicekal adalah Kaspul Anwar (No. Paspor AR708169) dan istrinya Fisa Liza (No. Paspor AR267462). Dua Petugas P4TKI di pelabuhan Dumai justru arahkan Liza dan Anwar untuk temui calo dan membayar Rp 300.000/orang. Anwar dan Liza adalah TKI yang cuti karena anaknya sakit”²⁶

Hal di atas menunjukkan bahwa apa yang sudah menjadi kebijakan pemerintah Jokowi, dalam tataran praktek di lapangan masih belum maksimal. Meskipun pemerintah pusat sudah menginstruksikan aturan-aturan yang meringankan TKI, namun masih banyak aparat pemerintah yang lalai atau sengaja melanggar peraturan sehingga justru TKI kembali menjadi korban. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki TKI, masih besar kemungkinan TKI akan terus-menerus menjadi korban aparat yang tidak bertanggungjawab. Budaya korupsi tampaknya masih sulit untuk dihilangkan meskipun pemerintah sendiri sudah membentuk apa yang disebut sebagai Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Artinya, ada indikasi kinerja Saber Pungli masih belum maksimal disebabkan para aparat yang “di dalam” masih belum “benar-benar bersih” dan oleh karenanya harus “dibersihkan” dahulu.²⁷

Dengan demikian, kebijakan pemerintah terkait TKI tidak jauh berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Di tengah berbagai kasus yang menimpa TKI di Malaysia, pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono juga dinilai masih gagal dalam menangani isu TKI, terutama terkait masalah perlindungan dan maraknya kasus penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga asal Indonesia.²⁸ Sementara, di periode awal pemerintahan Presiden Jokowi atau akhir 2014, perkembangan isu TKI terutama terkait jumlah TKI yang dikirim ke Malaysia bisa dikategorikan masih tinggi meskipun mengalami penurunan. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mencatat adanya penurunan jumlah TKI yang dikirim ke luar negeri. Menurut catatan BNP2TKI, jumlah TKI yang dikirim ke luar negeri tahun 2014 mencapai 429.872 orang dengan berbagai negara tujuan. Jumlah tersebut terdiri dari 219.610 orang (58%) bekerja di sektor formal dan 182.262 orang (42%) ditempatkan di sektor informal terutama pembantu rumah tangga. Dalam laporan BNP2TKI juga terungkap bahwa Provinsi Jawa Barat menempati urutan pertama penyumbang TKI sebanyak 105,479 disusul Jawa Tengah 92.590, Jawa Timur 78.306, Nusa Tenggara Barat 61.139 serta provinsi lain, namun dengan jumlah di bawah lima puluh ribu orang. Menariknya, kabupaten penyumbang TKI terbesar bukan dari Jawa Barat namun Lombok Timur dengan total TKI sebanyak 29.510 orang.

Sedangkan Malaysia adalah negara penerima jasa TKI terbesar tahun 2014 dengan total 127.827 orang disusul Taiwan 82.665, Arab Saudi 44.325, Hong Kong 35.050, Singapura 31.680, Oman 19.141 dan lain-lain.²⁹

Beberapa Kasus TKI di Malaysia Era Jokowi

Selama paruh pertama periode kepemimpinan Presiden Jokowi, berbagai kasus yang melibatkan TKI masih terjadi. Misalnya satu bulan sebelum dilantik, tepatnya September 2014, masyarakat dikejutkan dengan sebuah kasus penganiayaan TKI. Kali ini menimpa tiga warga negara Indonesia asal Sukabumi tepatnya Kecamatan Parungkuda. Ketiganya disekap oleh majikannya di sebuah perusahaan pembuatan mie di negara bagian Sarawak, Malaysia. Diduga kuat ketiga warga negara Indonesia tersebut adalah korban perdagangan manusia dan perbudakan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kasus ini terungkap ke publik setelah salah satu korban berhasil melakukan kontak dengan keluarganya di Sukabumi. Kemudian, pihak keluarga melaporkan kejadian tersebut ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sukabumi yang selanjutnya pihak P2TP2A meneruskan ke pihak yang berwenang khususnya Kementerian Ketenagakerjaan.³⁰

Kasus seterusnya yang melibatkan TKI adalah kasus penganiayaan yang menimpa Meriance Kabu, TKI asal Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada bulan Desember 2014. Meriance Kabu mendapat perlakuan yang sangat tidak manusiawi oleh majikannya di sebuah apartemen di Ampang, Kuala Lumpur, Malaysia. Meriance misalnya mengaku disiksa dengan berbagai cara seperti meminum air urine sendiri, dicabut giginya ketika pingsan termasuk mengalami kekerasan di bagian alat vitalnya. Kasus tersebut sudah ditangani oleh pihak KBRI di Kuala Lumpur dan aparat setempat. Akibat adanya kasus penganiayaan Meriance, desakan kepada pemerintah untuk menghentikan pengiriman TKI khususnya sektor pembantu rumah tangga semakin kencang. Pasca kasus penganiayaan tersebut, Meriance berpesan kepada masyarakat Indonesia khususnya warga NTT untuk bekerja di kampung halaman sendiri saja meskipun dengan hasil yang tidak maksimal daripada bekerja di Malaysia tetapi mendapatkan musibah.³¹

Memasuki tahun 2015, kasus penganiayaan TKI di Malaysia terus terjadi. Kali ini melibatkan Norfia Linda, TKI asal Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang disiksa majikannya di negara bagian Selangor Malaysia pada bulan April 2015. Kasus tersebut sudah ditangani oleh KBRI dan aparat berwenang setempat. Dalam pengakuannya, Norfia mendapatkan perlakuan sangat menyedihkan, misalnya dipukul dengan rotan dan tongkat besi. Akibatnya, bagian tubuhnya mengalami luka serius, terutama muka,

kepala, punggung, serta satu jari tangan patah akibat penyiksaan tersebut sebelum akhirnya secara tragis dibuang di sebuah perkampungan orang asli di pinggiran hutan oleh majikannya. Adanya kasus tersebut telah memicu aksi demonstrasi di depan Istana Merdeka Jakarta oleh kelompok yang menamakan sebagai Aliansi TKI.³²

Tahun 2015, cerita tentang kisah sedih TKI ditutup dengan kasus penganiayaan yang menimpa Nurjanah binti Saidi, TKI asal Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat pada bulan Desember 2015. Nurjanah disiksa majikannya di Miri, negara bagian Sarawak, Malaysia hingga mengalami luka serius di bagian mata dan giginya patah. Lebih menyedihkan lagi, Nurjanah tidak pernah menerima gaji selama dua tahun bekerja dengan majikannya tersebut. Kasus Nurjanah langsung ditangani oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kuching, Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Pontianak dan Polis Diraja Malaysia (PDRM). Majikan Nurjanah juga langsung ditangkap kepolisian Malaysia.³³

Setelah melewati tahun 2015, berita tentang penganiayaan TKI kembali terulang di tahun 2016. Pada bulan Februari 2016, sebuah video berdurasi pendek terkait penganiayaan TKI menjadi viral di media sosial Indonesia. Video tersebut mendemonstrasikan aksi penganiayaan TKI dengan cara dipukul menggunakan semacam cambuk, sesekali ditambah dengan tendangan ke bagian tubuh korban. Ada dugaan, korban dituduh mencuri harta milik perusahaan di mana ia bekerja. Meskipun belum teridentifikasi siapa yang menjadi pelaku dan korban, setidaknya kasus tersebut bisa menjadi gambaran bahwa kasus penganiayaan terhadap TKI masih saja terjadi dengan skenario yang hampir sama, yaitu kekerasan fisik.³⁴

Tahun 2016, ditutup dengan sebuah kasus yang sangat menggemparkan masyarakat Indonesia. Adalah kasus penganiayaan sadis yang dialami oleh Suyanti Binti Sutrisno, TKI asal Kota Medan, Sumatera Utara pada bulan Desember 2016. Suyanti yang baru bekerja dua minggu sebagai pembantu rumah tangga di Kuala Lumpur. Suyanti terpaksa melarikan diri dari majikannya setelah mengalami berbagai penganiayaan dan luka-luka di sekujur tubuhnya, termasuk fasilitas makan dan mandi sehari sekali serta memutus semua sarana komunikasi dengan dunia luar. Setelah dengan segala cara lari dari majikan, Suyanti diselamatkan oleh warga lokal beretnis Melayu di sebuah selokan dalam keadaan luka-luka dan dibawa ke kantor polisi terdekat. Pihak KBRI juga langsung memberikan advokasi dan bantuan termasuk melayangkan protes keras kepada pemerintah Malaysia terkait dengan kasus tersebut. Kepolisian Malaysia langsung menangkap pelaku penganiayaan tidak lama setelah kasus Suyanti terkuak ke publik. Kasus Suyanti juga menjadi pemberitaan utama di media-media lokal Malaysia.³⁵

Sementara awal tahun 2017, tepatnya awal bulan Februari masyarakat dikejutkan dengan kasus Siti Aisyah, TKI asal Kabupaten Serang, Banten yang terlibat pembunuhan tokoh politik Korea Utara, Kim Jong-nam, di Malaysia. Kasus tersebut menyita perhatian tidak hanya di Indonesia, tetapi juga publik internasional karena melibatkan tokoh politik Korea Utara. Bahkan akibat adanya kasus pembunuhan tersebut, hubungan Malaysia-Korea Utara memanas yang ditandai dengan saling melakukan pencekalan dan perintah penangkapan diplomat oleh kedua negara. Hubungan kedua negara kembali normal pasca kesepakatan kedua pihak terkait pemulangan jenazah Kim Jong-nam.³⁶ Sementara, Siti Aisyah langsung diamankan oleh kepolisian Malaysia setelah melakukan penyelidikan atas kamera CCTV Bandara Internasional Kuala Lumpur. Siti Aisyah “diduga” dijebak oleh intelijen untuk melakukan pembunuhan tokoh Korea Utara dalam skenario “*reality show*.” Sebagai imbalannya, Aisyah dijanjikan akan menerima upah sebesar 400 Ringgit Malaysia (1,2 juta Rupiah).³⁷ Bagaimanapun, Siti Aisyah telah menjalani beberapa kali persidangan dan terancam dengan pasal 302 (*Seksyen 302*) Hukum Pidana (*Kanun Keseksaan*) Malaysia dengan ancaman hukuman mati jika terbukti bersalah.³⁸

Masih pada bulan yang sama, publik juga dikejutkan dengan kasus kematian Jubaedah, seorang TKI asal Cirebon, Jawa Barat yang meninggal secara mengenaskan setelah dianiaya majikannya sendiri. Sebelumnya, Jubaedah diduga meninggal karena jatuh atau terpeleset dari rumah majikannya. Namun, hasil penyelidikan pihak kepolisian dan rumah sakit di George Town Penang, menunjukkan bahwa TKI tersebut merupakan korban pembunuhan yang tidak lain dilakukan oleh majikannya sendiri. Kasus Jubaedah sudah ditangani pihak yang berwenang dan pelakunya, yaitu pasangan suami-istri, telah ditangkap kepolisian Malaysia.³⁹

Dengan demikian, selama paruh pertama pemerintahan Presiden Jokowi, kasus demi kasus yang melibatkan TKI di Malaysia masih terus terjadi. Dalam hal ini, pemerintah jelas sudah melakukan berbagai upaya untuk membantu korban dan menyelesaikannya di jalur hukum di Malaysia, termasuk melayangkan protes kepada pemerintah Malaysia. Namun berbagai kasus di atas juga menunjukkan bahwa permasalahan TKI masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah yang tidak mudah untuk diselesaikan dalam waktu singkat. Masalah bangsa yang multi-dimensi menjadi hambatan sekaligus tantangan pemerintah untuk dicarikan solusinya demi kesejahteraan semua lapisan masyarakat, tidak terkecuali para TKI di Malaysia.

Implikasi kepada Hubungan Indonesia-Malaysia

Adanya berbagai kasus di atas jelas pada akhirnya berdampak pada hubungan Indonesia-Malaysia secara umum, terutama era pemerintahan Presiden Jokowi. Dinamika hubungan kedua negara dalam beberapa kasus dan periode sebelumnya pada dasarnya tidak ada perubahan yang signifikan. Malaysia misalnya, dalam menyikapi TKI terkesan bersikap *ambivalent*. Alasannya sederhana, yaitu pemerintah Malaysia masih membutuhkan jasa TKI yang bisa dikatakan masih memiliki tarif upah rendah terutama sektor pertanian dan konstruksi dibanding negara lain. Sedangkan warga negara Malaysia atau masyarakat lokal jelas tidak ada yang mau bekerja di sektor yang dikenal dengan *3D (dirty, dangerous, and difficult)*.⁴⁰ Namun pada waktu yang sama, Malaysia juga tidak ingin terdampak oleh membanjirnya TKI yang berpotensi bisa mengganggu ketertiban masyarakat, sosial dan bahkan keamanan negara jiran.⁴¹ Bagi Indonesia, tentu dengan banyaknya TKI di Malaysia secara tidak langsung diuntungkan karena bisa mengurangi angka pengangguran yang sangat tinggi di tengah terbatasnya lowongan pekerjaan.⁴²

Dalam konteks pemerintahan Presiden Jokowi, ada beberapa hal yang bisa dibincangkan untuk dijadikan analisa terkait TKI dan implikasinya kepada hubungan Indonesia-Malaysia. Misalnya, terkait dengan maraknya kasus penganiayaan TKI di Malaysia, pemerintah mewacanakan sistem satu pintu. Hal ini merupakan hasil kesepakatan bersama antara Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Najib Razak dalam kunjungan perdananya ke Malaysia pasca dilantik menjadi Presiden Indonesia ke-7. Kesepakatan tersebut lahir dari permasalahan mendasar yang selama ini menjadi akar munculnya berbagai kasus, yaitu rumitnya masalah agen TKI (PJTKI). Selama ini agen TKI bebas merajalela melakukan operasinya yang mengakibatkan timbulnya masalah termasuk memicu adanya kasus perdagangan manusia dan menjamurnya TKI ilegal. Pasca pertemuan Jokowi-Razak, kedua negara sepakat untuk merampingkan serta memberantas agen-agen TKI nakal baik di Indonesia maupun di Malaysia. Kedua negara sepakat untuk menggunakan jalur *government to government* dalam proses perekrutan TKI. Selain kesepakatan satu pintu, kedua negara setuju untuk membentuk *Join Working Group (JWG)* untuk menangani masalah TKI.⁴³

Hubungan kedua negara dalam kasus TKI sedikit terganggu dengan keterlibatan Ajeng Yulia, salah seorang TKI asal Jakarta dalam kasus narkoba. Kasus Ajeng mencuat ke publik pasca putusan pengadilan Malaysia yang memvonis hukuman mati karena didakwa menyelundupkan narkoba jenis *methamphetamine*. Menteri Ketenagakerjaan juga memastikan bahwa pemerintah sekuat tenaga akan membantu dan mengadvokasi kasus

Ajeng Yulia. Namun, hukuman mati sudah terlanjur diputuskan oleh pengadilan Malaysia. Ajeng mengaku hanya sebagai “korban” konspirasi bandar narkoba yang melibatkan warga negara Nigeria bernama Stanley, hasil perkenalannya di media sosial. Bagaimanapun, Ajeng Yulia gagal membuktikan di pengadilan bahwa dirinya tidak bersalah dalam kasus tersebut.⁴⁴ Pemerintah Malaysia melalui Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menyatakan bahwa peredaran narkoba di negeri jiran tersebut sudah sangat mengkhawatirkan karena banyaknya korban terutama generasi muda.⁴⁵

Isu lain yang melibatkan hubungan kedua negara terkait masalah TKI adalah langkah deportasi pemerintah Malaysia dalam beberapa tahun terakhir. Di awal pemerintahan Jokowi, pemerintah Malaysia sudah berencana akan mendeportasi sekitar 50.000 TKI ilegal. Berdasarkan catatan KBRI Kuala Lumpur, angka tersebut tersebar di beberapa negara bagian dengan berbagai kasus dan masalah. Misalnya, di Johor ada sekitar 21.000 TKI ilegal dan di negara bagian Sarawak dan negara bagian lain kurang lebih 16.000 TKI, termasuk 5.000 di antaranya sedang mendekam di penjara-penjara Malaysia. KBRI juga memprotes sikap pemerintah Malaysia yang cenderung hanya menindak TKI sedangkan majikan nakal masih belum banyak tersentuh. Misalnya, baru sekitar 400 majikan yang ditindak pemerintah Malaysia, jauh dari jumlah TKI yang terkena kasus. KBRI juga membantah bahwa kebijakan pemerintah Malaysia tersebut sebagai respon atas kebijakan agresif pemerintah Indonesia dalam isu penangkapan dan penenggelaman kapal nelayan asing, termasuk dari Malaysia di kawasan perbatasan.⁴⁶

Kasus pendeportasian TKI dari Malaysia memang menjadi isu hangat antara kedua negara selama Presiden Jokowi memimpin Indonesia. Akhir Desember 2014, di awal pemerintahan Jokowi, sebanyak 22.312 TKI dideportasi dari Malaysia.⁴⁷ Sementara di Provinsi Nusa Tenggara Barat misalnya, tercatat pada tahun 2015, terdapat sekitar 1.700 TKI yang dideportasi oleh pemerintah Malaysia.⁴⁸ Permasalahan pendeportasian TKI dari Malaysia juga dialami oleh Provinsi Kalimantan Barat. Menurut catatan BP3TKI Pontianak, sepanjang tahun 2015, pihaknya menerima laporan sebanyak 1.904 TKI telah dideportasi oleh pemerintah Malaysia. Umumnya, kasus yang diadvokasi dari sekian banyak permasalahan TKI di Malaysia adalah isu kematian TKI, kecelakaan kerja, depresi, pemutusan hubungan kerja (PHK) dan sakit. Selain itu, mayoritas TKI yang dideportasi merupakan TKI ilegal dengan berbagai kasus, seperti izin tinggal yang telah habis, masalah dengan majikan, penunggakan gaji, masalah komunikasi, hamil di luar nikah dan meninggal dunia.⁴⁹ Sementara di Nunukan Kalimantan Utara

juga menjadi salah satu pintu pendeportasian TKI dari Malaysia dengan 183 pekerja yang umumnya berstatus ilegal.⁵⁰ Dengan demikian, di tahun 2015, pemerintah Malaysia telah mendeportasi TKI lebih dari 10.000 orang kembali ke Indonesia meskipun kedua negara telah mencapai beberapa kesepakatan penting terkait isu TKI.

Tahun 2016, jumlah TKI yang dideportasi pemerintah bahkan lebih banyak lagi. Menurut catatan KJRI Johor, sepanjang tahun 2016, sebanyak 17.921 orang dideportasi dengan berbagai kasus. Namun kebanyakan masih dengan isu yang lama yaitu izin tinggal (*overstay*) dan tidak mempunyai dokumen keimigrasian apapun. Untuk mempercepat proses pemulangan TKI ilegal, pemerintah Malaysia menggunakan pendekatan persuasif melalui *Program Pulang Sukarela (Voluntary Return)*. Kota Nunukan masih menjadi salah satu pintu pemulangan TKI yang sangat penting. Menurut laporan Imigrasi Nunukan, dari sekian banyak TKI yang dideportasi pemerintah Malaysia, Pelabuhan Nunukan menerima sekitar 3.622 hingga September 2016. Adapun rincian dari 3.622 jumlah TKI yang dideportasi digambarkan seperti pada tabel 1.

Tabel 1. Deportasi TKI Melalui Pelabuhan Internasional Tunon Taka Kabupaten Nunukan

Bulan	Jumlah TKI
Januari	282
Februari	518
Maret	393
April	338
Mei	371
Juni	604
Juli	450
Agustus	278
September	388
Jumlah	3.622

Sumber: Antara, “TKI ilegal masih marak, Malaysia deportasi lagi 3.622 orang via Nunukan,” diakses 20 Juni 2017, <http://www.antarane.ws.com/berita/589522/tki-ilegal-masih-marak-malaysia-deportasi-lagi-3622-orang-via-nunukan>

Memasuki tahun 2017, dunia ketenagakerjaan Indonesia juga dibuka dengan masalah pendeportasian TKI oleh pemerintah Malaysia. Pada awal Januari 2017, melalui negara bagian Johor, pemerintah Malaysia mendeportasi sekitar 726 TKI dengan berbagai kasus. Namun, menurut

KJRI Johor, kebanyakan TKI yang dipulangkan ke Indonesia merupakan residivis pasca menjalani masa hukuman di penjara di Semenanjung Malaysia hasil dari operasi penertiban oleh aparat imigrasi Malaysia.⁵¹ Satu bulan kemudian yaitu bulan Maret 2017, melalui Nunukan, pemerintah Malaysia mendeportasi sekitar 375 warga negara Indonesia yang umumnya bekerja di negara bagian Sabah.⁵² Sementara melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Entikong di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, pemerintah Malaysia mendeportasi sekitar 43 TKI bermasalah yang bekerja di negara bagian Sarawak.⁵³ Kemudian, pada bulan Mei 2017, kembali Malaysia mendeportasi sekitar 132 TKI dari Sabah melalui pintu kedatangan Nunukan, Kalimantan Utara.⁵⁴ Sebagaimana umumnya para TKI yang sudah bertekad berprofesi sebagai TKI, kebanyakan tetap berniat akan kembali ke Malaysia, meskipun dengan cara ilegal.

Terlepas dari berbagai masalah yang dihadapi, banyaknya TKI yang bekerja di Malaysia dengan segala dinamikanya telah memberikan kontribusi baik positif maupun negatif kepada negara dan diri mereka sendiri. Bagi mereka yang telah merasakan dan mendapatkan keuntungan dari bekerja di Malaysia, tentu akan memandang positif apa saja terkait kebijakan Malaysia dengan segala kekurangan dan kelebihan. Sebaliknya, bagi TKI yang mendapatkan pengalaman menyedihkan ketika bekerja di Malaysia, jelas akan menilai bahwa bekerja di Malaysia hanya akan membawa sengsara. Begitu juga pemerintah, disebabkan laporan yang diterima selalu berupa masalah, maka akan memberikan justifikasi bahwa bekerja di Malaysia hanya membuat masalah dan bahkan merendahkan harkat dan martabat bangsa Indonesia.

Terkait masalah pendeportasian TKI misalnya, tanggapan Presiden Jokowi cenderung negatif. Dalam sebuah laporan, Presiden Jokowi menyatakan:

“Saya memberikan target kepada Menteri Tenaga Kerja untuk membuatkan *roadmap* yang jelas, dan kapan kita *stop* yang namanya pengiriman pembantu rumah tangga (PRT).”⁵⁵

Ini artinya, jelas bahwa dengan begitu banyaknya masalah yang melibatkan TKI di Malaysia khususnya pembantu rumah tangga, solusi satu-satunya menurut pemerintah adalah penghentian total pengiriman TKI sektor tersebut. Hal ini juga menunjukkan bahwa pilihan pemerintah sangat terbatas dan belum bisa menawarkan solusi lain terkait isu penanganan TKI. Rencana pemerintah tersebut juga terkesan gegabah mengingat solusi yang ditawarkan hanya untuk menuruti aspirasi pemerintah sesaat. Misalnya pemerintah merasa tersinggung dan direndahkan harga dirinya di depan

Malaysia karena banyaknya warga negara Indonesia yang menjadi pembantu rumah tangga warga Malaysia. Presiden Jokowi menegaskan bahwa:

“Di dunia hanya ada tiga negara penyuplai PRT, dua di Asia dan satu di Afrika. Yang di Asia salah satunya Indonesia. Ini masalah martabat kita. Waktu kita bilateral dengan Malaysia, saya betul-betul malu.”⁵⁶

Pernyataan Presiden Jokowi jelas, bahwa penghentian pengiriman TKI dilakukan untuk menaikkan harga diri Indonesia di depan Malaysia. Dalam hal ini jelas ketika para TKI berhasil memperoleh keuntungan ekonomi demi menafkahi keluarga di tengah terbatasnya lowongan pekerjaan di Indonesia sama sekali tidak menjadi ukuran. Apa yang penting adalah Indonesia tidak malu dan rendah martabatnya di depan negara lain khususnya Malaysia, namun tidak memberikan solusi dan alternatif lebih baik daripada penghentian pengiriman TKI. Sementara dari kalangan masyarakat juga memberikan penilaian yang sama terkait isu penghentian pengiriman TKI ke Malaysia. Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengkritik kebijakan pemerintah yang sejak dahulu terkesan reaktif dan bersifat sementara dalam setiap terjadi masalah TKI. Seharusnya menurutnya:

“Sebuah negara baru bisa memberikan perlindungan kepada buruh migran, sepanjang negara tersebut sudah siap mempunyai perlindungan yang baik. Selain itu, negara tersebut juga harus mempunyai diplomasi yang kuat.”⁵⁷

Kebijakan yang terkesan reaktif tersebut, justru memicu sikap defensif TKI itu sendiri yang ingin mencari solusi menurut cara mereka. Dampaknya, muncul “inovasi-inovasi” baik para calo tenaga kerja maupun TKI untuk bisa lepas dari kebijakan tersebut dan bisa bekerja ke luar negeri. Berdasarkan catatan BNP2TKI, pasca rencana penghentian pengiriman TKI dan moratorium ke sejumlah negara, justru muncul modus baru sistem perdagangan manusia. Misalnya pemalsuan dokumen, melalui negara transit non-moratorium dan lain-lain.⁵⁸

Pada waktu yang sama, Malaysia menanggapinya dengan tenang. Menurut ketua persatuan majikan pembantu rumah tangga Malaysia atau *Persatuan Majikan Amah Malaysia (MAMA)* Ahmad Fauzi Engku Muhsein mengatakan bahwa:

“Banyaknya negara pengirim pembantu rumah tangga tidak hanya akan memenuhi lowongan, namun juga bisa memberikan banyak pilihan kepada majikan dan bisa menghidupkan kembali industri pembantu rumah tangga [...] tanpa harus tergantung dengan satu negara tertentu.”⁵⁹

Sementara pemerintah Malaysia menilai bahwa kehadiran pekerja asing termasuk dari Indonesia, nyata berdampak positif kepada perekonomian

Malaysia. Pemerintah Malaysia juga sadar bahwa di era globalisasi yang membawa konsekuensi bebasnya arus lintas batas manusia, bisa dimanfaatkan dengan baik termasuk migrasi pekerja asing. Dengan membanjirnya pekerja asing di Malaysia, yang perlu dilakukan adalah bagaimana keberadaannya bisa bermanfaat tidak hanya kepada negara penerima, namun diharapkan juga kepada pekerja dan negara asal.⁶⁰ Pandangan yang sama juga diutarakan oleh beberapa akademisi Malaysia. Salah satunya menyatakan bahwa keberadaan TKI jelas sangat penting dalam hubungan Indonesia-Malaysia. Dalam pernyataannya:

“Bagi saya kalau diibaratkan memasak masakan yang sedap, TKI merupakan *ingredient* paling penting dalam masakan itu. Jadi TKI juga yang paling penting dalam hubungan Malaysia-Indonesia.”⁶¹

Pernyataan di atas jelas menunjukkan bahwa posisi TKI di Malaysia memang tidak bisa dipinggirkan dalam diskursus pembangunan negara itu. Bagaimanapun, sejak awal negara Malaysia telah menggunakan jasa pekerja asing terutama dari China dan India yang kini sebagian besar sudah diakui menjadi warga negara Malaysia. Artinya, Malaysia jelas sangat diuntungkan dengan kehadiran pekerja asing termasuk dari Indonesia yang *trend*-nya baru muncul pada tahun 1980an dan 1990an. Dalam konteks ini, tentu dinamika TKI di Malaysia juga selalu muncul dalam narasi hubungan Indonesia-Malaysia sebagai dua negara serumpun. Sebagai penyumbang terbesar tenaga kerja asing sektor non-formal, bisa dikatakan sebagian besar hasil pembangunan di Malaysia mulai dari kota hingga ke pelosok desa adalah karya para pencari nafkah asal Indonesia.⁶²

Dalam konteks hubungan Indonesia-Malaysia era pemerintahan Presiden Jokowi, isu TKI menimbulkan dua polemik sekaligus, yaitu di kalangan TKI sendiri dan di tingkat elit antar negara Indonesia-Malaysia. Di kalangan TKI, isu TKI dihembuskan dalam rangka perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri ketika Presiden Jokowi melakukan kampanye Calon Presiden 2014 dan pasca dilantik dalam kunjungan pertama ke Malaysia. Pada awalnya, harapan TKI begitu tinggi kepada pemerintah Jokowi mengingat komitmennya yang besar kepada perlindungan dan nasib TKI. Hal ini tercermin dalam berbagai pernyataan yang diwakili oleh LSM *Migrant Care*. Namun, dalam perjalanannya mulai muncul kekecewaan di kalangan TKI, termasuk *Migrant Care*, terkait kebijakan pemerintah memberhentikan pengiriman TKI ke luar negeri untuk sektor pembantu rumah tangga. Pemerintah justru dianggap tidak membela nasib TKI dan mengingkari janjinya pada masa kampanye. Kebijakan pemerintah tersebut dinilai bukan solusi dan hanya bersifat reaktif di tengah berbagai kasus TKI yang terus berlangsung di Malaysia. Pemerintah dinilai tidak memberikan

solusi konkret terutama menyangkut pembukaan lapangan pekerjaan yang sangat terbatas di tengah derasnya isu membanjirnya pekerja asing asal China ke Indonesia.

Di tingkat elit antar negara Indonesia-Malaysia, isu TKI bukan barang baru. Sejak lama kedua negara selalu berhadapan dengan isu TKI yang tidak kunjung selesai. Hal inilah yang pada akhirnya memunculkan respon pemerintah untuk menghentikan pengiriman TKI sektor pembantu rumah tangga, termasuk ke Malaysia. Pemerintah merasa malu dan hilang harkat serta martabatnya di depan Malaysia akibat banyaknya warga negara Indonesia yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan sektor non-formal lain dengan gaji murah untuk orang Malaysia. Di sisi lain, Malaysia merasa terbantu dengan adanya pekerja Indonesia di banyak sektor di tengah keengganan warganya melakukan pekerjaan kasar. Namun, Malaysia juga mulai terusik dengan kebijakan sepihak pemerintah Indonesia melakukan penangkapan dan penenggelaman kapal nelayan Malaysia di daerah perbatasan tanpa negosiasi yang jelas dengan pemerintah Kuala Lumpur. Pemerintah Malaysia tentu juga berpikir keras untuk memutus ketergantungan pekerja Indonesia yang mahir dan bergaji murah. Sebaliknya, pemerintah Indonesia juga berfikir keras untuk menghentikan pengiriman pekerja sektor rumah tangga ke Malaysia, namun juga kesulitan untuk menambah jumlah lowongan pekerjaan di tengah lesunya perekonomian dunia. Dalam waktu yang singkat adalah mustahil kedua negara akan menemukan solusinya. Malaysia masih akan kesulitan mencari pembantu murah dan bisa diterima masyarakat Muslim di luar Indonesia. Di lain pihak, Indonesia masih sulit membuka lapangan pekerjaan dalam jumlah besar dan dalam waktu yang singkat.

Jika ditelusuri lebih jauh apa yang sudah menjadi diskursus di masyarakat tentang TKI, sudah seharusnya ditinjau ulang. Objektivitas dan akal sehat harus dikedepankan demi mendapatkan informasi yang jelas dan tidak mengedepankan emosi. Misalnya, berdasarkan data yang dikeluarkan KBRI Kuala Lumpur, sepanjang tahun 2006-2008 jumlah kasus yang melibatkan TKI rata-rata 766 kasus dari total jumlah TKI di Malaysia sebanyak 2 juta orang TKI baik ilegal maupun legal atau hanya sekitar 0.03 %. Artinya, bisa dibayangkan sisanya yang 99.97% TKI di Malaysia relatif tidak bermasalah. Namun faktanya, narasi yang dimunculkan justru yang 0.03% menjadi berita besar dan terus-menerus diputar serta disajikan ke masyarakat. Sebaliknya, jarang sekali sebuah berita tentang kesuksesan TKI (99.97%) dimunculkan media dan disebarakan ke masyarakat luas di Indonesia. Media tampaknya masih sesuai dalilnya "*a bad news is a good news,*" serta cenderung tidak proporsional dan mengedepankan etika sehingga yang

ada adalah isu TKI bermasalah di Malaysia.⁶³ Menurut Menteri Penerangan Malaysia Zainuddin Maidin:

“Selama ini media Indonesia memilih untuk tidak melaporkan kejayaan atau keberhasilan mereka di Malaysia. Sebaliknya, lebih menonjolkan berita sebilangan kecil TKI yang didera majikan, yang tidak dibayar gaji dan dihantar pulang kerana masuk ke Malaysia secara haram.”⁶⁴

Menurut Nasrullah Ali Fauzi, ada dua faktor penting dibalik tidak munculnya narasi keberhasilan TKI di Malaysia yang sebetulnya lebih dominan dibanding cerita-cerita pilu dan menyedihkan. Faktor pertama, media masa jelas lebih tertarik menyiarkan berita yang “laku” untuk dijual ke pasaran/pembaca, misalnya kasus-kasus kejahatan, skandal seks dan sejenisnya yang melibatkan TKI. Faktor kedua, sikap “diam” TKI sendiri yang sukses dan berjaya dalam karirnya dinilai sebagai faktor penting mengapa berita itu tidak muncul. Para TKI yang sukses cenderung diam dan tidak mau mengekspos keberhasilannya ke publik karena ada dua kekhawatiran yaitu bisa menimbulkan kecemburuan antar sesama TKI dan kecemburuan dengan pekerja dan masyarakat lokal Malaysia.⁶⁵ Dengan demikian jelas tidak mudah untuk menyederhanakan persoalan TKI di Malaysia. Jumlah TKI yang sangat banyak hampir menyentuh angka 10% dari jumlah penduduk Malaysia adalah sebuah masalah tersendiri dan memerlukan penyelesaian secara komprehensif dan tidak bersifat *ad hoc*.

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, maka bisa disimpulkan bahwa di era pemerintahan Presiden Jokowi isu TKI termasuk isu penting yang selalu menjadi pembahasan dan perhatian pemerintah. Di awal pemerintahan termasuk ketika kampanye Calon Presiden 2014, Presiden Jokowi sangat perhatian dengan urusan TKI dan perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Namun, pada akhirnya justru timbul kekecewaan di kalangan TKI akibat rencana pemerintah menghentikan pengiriman TKI sektor rumah tangga ke luar negeri, termasuk ke Malaysia tanpa solusi yang jelas. Apalagi, iklim bekerja di Indonesia masih jauh dari harapan di tengah terbatasnya lowongan pekerjaan dan derasnya isu kedatangan pekerja asing asal China ke Indonesia. Pada saat yang sama, kasus penganiayaan pekerja Indonesia di Malaysia masih terus berlangsung. Selain itu, pemerintah dengan segala pertimbangannya merasa dipermalukan dengan kondisi tersebut di depan Malaysia yang sudah melejit pembangunan ekonominya. Dalam situasi ini, pemerintah terkesan belum bisa menawarkan solusi bijak terkait TKI di tengah kompleksitasnya permasalahan bangsa.

Sementara, ada beberapa isu mengemuka terkait TKI yang berimplikasi kepada hubungan Indonesia-Malaysia. Isu penting yang menjadi perhatian adalah isu moratorium hingga ancaman penghentian pengiriman TKI, khususnya sektor domestik ke Malaysia. Adanya isu penghentian sepihak justru dilihat merugikan kedua belah pihak baik Indonesia maupun Malaysia. Bagi Indonesia, belum ada solusi jelas terkait kebijakan pasca penghentian dan ancaman bertambahnya angka pengangguran. Bagi Malaysia, akan kesulitan mencari pengganti pembantu rumah Muslim asal Indonesia. Pada saat yang sama, TKI juga mulai tergeser oleh pekerja dari negara lain yang menawarkan jasa kompetitif bagi para pengguna di Malaysia. Namun, isu penghentian TKI khususnya pembantu rumah tangga nyata berdampak pada tekanan dalam negeri Malaysia akibat tingginya biaya jasa pembantu rumah tangga. TKI asal Indonesia yang terkenal murah menjadi pilihan utama bagi keluarga di Malaysia khususnya etnis Melayu. Apalagi persamaan kultur dan bahasa menjadi pertimbangan utama perekrutan tersebut. Jika beralih ke pekerja asal Filipina, tentu dengan segala kelebihan misalnya sistem perekrutan dan kemampuan bahasa Inggris, menjadikan biaya pekerja asal Filipina sangat mahal. Tentu ada alternatif lain misalnya dari Kamboja, Vietnam, dan Myanmar, namun sangat berisiko akibat perbedaan terutama agama, budaya dan bahasa.

Keputusan Indonesia menghentikan pengiriman TKI khususnya pembantu rumah tangga lebih didorong oleh emosional sesaat. Pemerintah Indonesia merasa harga dirinya jatuh di hadapan pemerintah Malaysia, hanya gara-gara mayoritas pembantu rumah tangga di Malaysia adalah berasal dari Indonesia. Pemerintah tidak mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan dan risiko yang dihadapi para pencari nafkah asal Indonesia. Pernyataan dan ancaman terkait isu TKI tidak hanya berdampak pada kebijakan Indonesia-Malaysia, namun juga menjadi kebimbangan serius di kalangan TKI di lapangan. Sayangnya, hal ini malah diperparah dengan isu membanjirnya pekerja asing asal China yang sangat menyakitkan perasaan masyarakat di tengah tingginya angka pengangguran di Indonesia. Sehingga, jangan disalahkan jika kebijakan apapun yang dikeluarkan sepanjang tidak bisa menjamin mereka bekerja di tanah air dengan layak, maka para calon dan mantan TKI akan selalu berjuang keras kembali ke Malaysia meskipun dengan cara ilegal. Para TKI tentu sejak awal tidak ada yang berniat mau bekerja sebagai TKI dan buruh kasar, namun keadaan di Indonesia memaksa melakukan hal demikian demi menghidupi diri dan keluarganya.

Catatan Akhir

¹ Lili Yulyadi, "Hubungan Dinamik Antara Indonesia dan Malaysia Pasca Merdeka: Peranan Faktor "Co-Religio" Dalam Hubungan Dua Hala." dalam Mohamad Redzuan Othman, Md Sidin Ahmad Ishak, Jas Laile S. Jaafar, Adrianus Meliala & Sri Murni (Eds.), *Setengah Abad Hubungan Malaysia-Indonesia*, (Shah Alam: Arah Publications, 2009), pp. 359-371.

² J.C. Liow, *The Politics of Indonesia-Malaysia Relations: One Kin, Two Nations* (London: Routledge Curzon, 2005), 45.

³ Liow, *op. cit.*, 46.

⁴ Nor Azizan Idris, "Hubungan Malaysia-Indonesia dan Isu Pendatang Tanpa Izin," dalam Sity Daud & Zarina Othman (Eds.), *Politik dan Keselamatan* (Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 2005).

⁵ Muhammad Iqbal, & Arifin Zainal, "Tabap Kualiti Hidup Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia dan Faktor-Faktor Psikologikal Yang Mempengaruhinya," paper presented at the Persidangan Hubungan Malaysia-Indonesia, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 6-8 August, 2009.

⁶ "Menggapai Peluang, Hadapi Tantangan Untuk Dubes Baru," *Caraka*, vol. 42, no.12 (2012).

⁷ Liow, *op. cit.*, 148.

⁸ Liow, *op. cit.*, 149-153.

⁹ Wan Abdul Rahman Wan Ab. Latif, "Kes Perburuhan dan Tuduhan Politik Tidak Jejas Hubungan: Malaysia-Indon Cipta Masalah?," *Jurnal Pemikir*, 67(2012): 125-136.

¹⁰ Nasrullah Ali Fauzi, "Indonesia Dalam Pandangan Media Malaysia: Sebuah Kajian Awal," dalam Mohamad Redzuan Othman, Md Sidin Ahmad Ishak, Jas Laile S. Jaafar, Adrianus Meliala & Sri Murni (Eds.), *Setengah Abad Hubungan Malaysia-Indonesia*. (Shah Alam: Arah Publications, 2012), 479-496.

¹¹ J.C. Liow, "Malaysia's Approach to Its Illegal Indonesian Migrant Labour Problem: Securitization, Politics, or Catharsis?," *IDSS-FORD Workshop on Non-Traditional Security In Asia*. (Singapore: S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, 2004).

¹² Silfia Hanani, "Socio-Kultural Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia," paper presented at the Persidangan Hubungan Malaysia-Indonesia, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 6-8 August, 2009.

¹³ Liow, *op. cit.*

¹⁴ Ali Maksun & Reevany Bustami, "The 1965 coup and reformasi 1998: two critical moments in Indonesia-Malaysia relations during and after the Cold War," *SpringerPlus*, vol. 3, no. 45 (2014). doi: 10.1186/2193-1801-3-45

¹⁵ Migrant Care, "Siaran Pers Migrant Care Menyikapi Visi Misi Capres" (Jakarta: Migrant Care, 2014), diakses 12 April 2018, <http://www.migrantcare.net/2014/06/siaran-pers-migrant-care-visi-misi-pasangan-joko-widodo-muh-jusuf-kalla-lebih-memberikan-pengharapan-bagi-perlindungan-buruh-migran-indonesia/>

¹⁶ "Migrant Care Nyatakan Prabowo Nimbrung di "Tikungan Terakhir" Kasus TKI Wilfrida," *Berita Satu*, 23 Juni 2014, diakses 10 Juni 2017, <http://www.beritasatu.com/politik/192029-migrant-care-nyatakan-prabowo-nimbrung-ditikungan-terakhir-kasus-ki-wilfrida.html>

¹⁷ "Pemerintah akan Hentikan Pengiriman TKI Sektor Informal Secara Bertahap," *VOA Indonesia*, 25 Februari, 2015, diakses 10 Juni 2017, <https://www.voaindonesia.com/a/pemerintah-akan-hentikan-pengiriman-tki-sektor-informal-secara-bertahap/2657994.html>

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Khairudin Harahap, Laman Group Pusat Konsultasi TKI, 6 Mei 2015, diakses 6 Juli 2017, https://www.facebook.com/search/str/Jika%2Bkebijakan%2Bini%2Bbrasional%2Bkita%2Bdukung/keywords_posts?esd=eyJlc2lkIjoiUzpzfSTE1NDcxODAxMTJQ6Vks6Njg4MTE3MDI4MDAxMjU0IiwicHNpZCI6eyIxNTQ3MTgwNTI0OjY4ODEExNzAyODAwMTI1NCi6IIV6cGZlVEUxTkRjeE9EQTFNaIE2VmtzNk5qZzRNVEUzTURJNE1EQXhNalUwIn0sImNyY3QiOiJ0ZXh0IiwiaWY3NnZCI6IjIyODViOTBkMzQyM2E2YzU0MjY4ZDIxYUc2MThlNDk5In0%3D

²⁰ Pipiet Senja (ed.). *Seronok Negeri Jiran: Antologi Kisah WNI di Malaysia*, (Jakarta: Yayasan Budan Hadijah, 2015).

²¹ Wawancara, 13 Juni 2017.

²² Wawancara, 13 Juni 2017.

²³ Syamsuddin and Azlinda Azman, "Door to door cleaner": A new variant of human trafficking in domestic sector," *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 172 (2015): 405 – 410.

²⁴ "Tindak Lanjuti Revisi UU Perlindungan TKI, Pemerintah Bentuk Badan Pelaksana Kebijakan," *Kompas.com*, 20 Maret 2017, diakses 12 Juni 2017, <http://nasional.kompas.com/read/2017/03/20/21284141/tindak.lanjuti.revisi.uu.perlindungan.tki.pemerintah.bentuk.badan.pelaksana.kebijakan>

²⁵ "Jokowi hapus Kartu tenaga kerja luar negeri," *BBC Indonesia*, 30 November 2014, diakses 12 Juni 2017, http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/11/141130_presiden_hapus_kartu_tenagakerja_luar_negeri

²⁶ "TKI Masih Diperas karena Tak Miliki KTKLN," *Pusat Sumber Daya Buruh Migran*, diakses 12 Juni 2017, <http://buruhmigran.or.id/2014/12/02/tki-masih-diperas-karena-tak-miliki-ktkln/>

²⁷ "Pukat UGM: Satgas Saber Pungli Belum Maksimal," *Okezone*, diakses 12 Juni 2017, dalam <http://news.okezone.com/read/2017/01/16/510/1592667/pukat-ugm-satgas-saber-pungli-belum-maksimal>

²⁸ "Rapor Merah Pemerintahan SBY-JK, Dalam Agenda Perlindungan terhadap Buruh Migran Indonesia di Luar," *Migrant Care*, 2009, diakses 4 Februari 2013, <http://www.migrantcare.net/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=6&artid=678>

²⁹ "Sepanjang 2014 BNP2TKI Mencatat Penempatan TKI 429.872 Orang," *Situs Resmi BNP2TKI*, 16 Januari 2015, diakses 8 Juni 2017, <http://www.bnptki.go.id/read/9800/Sepanjang2014BNP2TKIMencatatPenempatanTKI429.872Orang.html>

³⁰ "3 TKI Asal Sukabumi Disekap Dalam Pabrik di Malaysia," *Koran Sindo*, 5 September 2014, diakses 8 Juni 2017, <https://daerah.sindonews.com/read/898500/21/3tkiasalsukabumidisekapdalampabrikdimalaysia1409887646>

³¹ "TKI Asal Kupang Disiksa Majikan di Malaysia," *Liputan 6*, 24 Desember 2014, diakses 8 Juni 2017, <http://global.liputan6.com/read/2152093/tkiasalkupangdisiksamajikandimalaysia>; "TKW Disiksa di Malaysia, Gigi Dicabut dan Organ Vital Dirusak," *Kompas.com*, 25 Desember 2014, diakses 8 Juni 2017, <http://regional.kompas.com/read/2014/12/25/22591691/TKW.Disiksa.di.Malaysia.Gigi.Dicabut.dan.Organ.Vital.Dirusak>

³² "Selain Alami Penyiksaan, TKW di Malaysia Ini Juga Dibuang Majikan ke Hutan," *Detik*, 23 April 2015, diakses 8 Juni 2017,

<http://news.detik.com/berita/2895732/selainalamipenyiksaantkwdimalaysiainijugadibuangmajikankehutan>

³³ “1 TKW Dianiaya di Malaysia, Diduga Korban Perdagangan Orang,” *Liputan 6*, 31 Desember 2015, diakses 8 Juni 2017,

<http://news.liputan6.com/read/2402080/1tkwdianiyadimalaysiaididugakorbanperdaganganororang>

³⁴ “Dituduh Mencuri, Seorang TKI Terekam Video Disiksa dan Dicambuk di Malaysia,” *Tribun Medan*, 22 Februari 2016, diakses 13 Juni 2017,

<http://medan.tribunnews.com/2016/02/22/dituduh-mencuri-seorang-tki-terekam-video-disiksa-dan-dicambuk-di-malaysia>

³⁵ “Suyanti , TKI Asal Medan Ini Disiksa Majikannya Di Malaysia,” *Kini News*, 24 Desember 2016, diakses 8 Juni 2017,

<http://dunia.kini.co.id/2016/12/24/4206/suyantitkiasalmedaninidisiksamajikannyadimalaysia>; “TKW Indonesia Disebut "Binatang" dan Disiksa di Malaysia,” *Okezone*, 24 Desember 2016, diakses 8 Juni 2017,

<http://news.okezone.com/read/2016/12/24/18/1574897/tkwindonesiadisebutbinatangdandisiksadimalaysia>; “TKI Suyanti Disiksa di Malaysia, Pemerintah Layangkan Nota Protes,” *Detik*, 27 Desember 2016, diakses 8 Juni 2017,

<https://news.detik.com/berita/d3381679/tkisuyantidisiksadimalaysiapemerintahlayangkannotaprotessitusresmiBNP2TKI>; “BNP2TKI: Majikan Harus Dihukum, dan TKI Suyanti Mendapatkan Keadilan,” *Situs Resmi BNP2TKI*, 27 Desember 2016, diakses 8 Juni 2017,

<http://www.bn2tki.go.id/read/11955/BNP2TKI:MajikanHarusDihukumdandanTKISuyantiMendapatkanKeadilan.html>

³⁶ “9 Malaysians held in North Korea arrive home,” *BBC*, 7 April 2017, diakses 17 Juni 2017, <http://edition.cnn.com/2017/03/30/asia/kim-jong-nam-malaysia-north-korea/index.html>

³⁷ “Siapa Siti Aisyah?,” *Utusan Malaysia*, 17 Februari 2017, diakses 17 Juni 2017, <http://www.utusan.com.my/berita/nasional/siapa-siti-aisyah-1.445666>

³⁸ “Kes pembunuhan Kim Jong-nam: 16 Jun ditetapkan untuk pengurusan kes,” *Utusan Malaysia*, 8 Juni 2017, diakses 17 Juni 2017,

<http://www.utusan.com.my/berita/mahkamah/kes-pembunuhan-kim-jong-nam-16-jun-ditetapkan-untuk-pengurusan-kes-1.490953>

³⁹ “Pasutri Malaysia Ditahan karena Diduga Aniaya TKI hingga Tewas,” *Okezone*, 27 Februari 2017, diakses 8 Juni 2017,

<http://news.okezone.com/read/2017/02/27/18/1629398/pasutrimalysiaditahankarenadidugaaniyatkihinggatawas>; *Okezone*, 1 Maret 2017, “Diduga Bunuh TKW Asal Indonesia, Suami-Istri di Malaysia Dicidaduk,” diakses 8 Juni 2017,

<http://news.okezone.com/read/2017/03/01/18/1630838/didugabunuhtkwasalindonesiasuamiistridimalysiadicidaduk>

⁴⁰ Muhammad Iqbal, & Arifin Zainal, “*Tabap Kualiti Hidup Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia dan Faktor-Faktor Psikologikal Yang Mempengaruhinya*,” paper presented at the Persidangan Hubungan Malaysia-Indonesia, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 6-8 August.

⁴¹ Nor Azizan Idris, *op. cit.*

⁴² Wan Shawaluddin Wan Hassan dan Zaini Othman “Ketidakstabilan Negara Jiran dan Kesannya kepada Keselamatan Malaysia.” *Sosiobumanika*, vo. 2, no. 1 (2009): 59-74.

⁴³ “Pengiriman TKI ke Malaysia Sistem Satu Pintu,” *Sinar Harapan*, 17 Maret 2015, diakses 15 Juni 2017, <http://www.sinarharapan.co/news/read/150317025/pengiriman-tki-ke-malaysia-sistem-satu-pintu>

⁴⁴ “Ajeng Yulia, WNI Terpidana Kasus Narkoba Menanti Eksekusi Mati,” *Sinar Harapan*, 28 Februari 2015, diakses 15 Juni 2017, <http://www.tribunnews.com/nasional/2015/02/28/ajeng-yulia-wni-terpidana-kasus-narkoba-menanti-eksekusi-mati>; “Pemerintah Upayakan Pembebasan Ajeng Yulia,” *Sinar Harapan*, 4 Maret 2015, diakses 15 Juni 2017, <http://www.sinarharapan.co/news/read/150304094/pemerintah-upayakan-pembebasan-ajeng-yulia-b-b->

⁴⁵ “Hukum mati WNI, Malaysia nyatakan perang lawan narkoba,” *Merdeka.com*, 2 Maret 2015, diakses 15 Juni 2017, <https://www.merdeka.com/dunia/hukum-mati-wni-malaysia-nyatakan-perang-lawan-narkoba.html>

⁴⁶ “Malaysia Siap Deportasi 50.000 TKI,” *Okezone*, 8 Desember 2014, diakses 15 Juni 2017, <http://news.okezone.com/read/2014/12/07/337/1075886/malaysia-siap-deportasi-50-000-tki>

⁴⁷ “Menaker Lepas Pemulangan 383 TKI Ilegal dari Malaysia,” *Republika*, 20 Desember 2014, diakses 20 Juni 2017, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/12/20/ngv3gk-menaker-lepas-pemulangan-383-tki-legal-dari-malaysia>

⁴⁸ “Sejak Januari, 1.700 TKI NTB Dideportasi dari Malaysia,” *Berita Satu*, 12 Oktober 2015, diakses 15 Juni 2017, <http://www.beritasatu.com/nasional/313855-sejak-januari-1700-tki-ntb-dideportasi-dari-malaysia.html>

⁴⁹ “Malaysia Deportasi 1.904 TKI Ke Kalbar Sepanjang Tahun 2015,” *RMOL*, 2 Januari 2016, diakses 20 Juni 2017, www.mol.co/read/2016/01/02/230220/Malaysia-Deportasi-1.904-TKI-Ke-Kalbar-Sepanjang-Tahun-2015-

⁵⁰ “Malaysia Deportasi 183 TKI Melalui Nunukan,” *Kompas.com*, 31 Oktober 2015, dalam <http://nasional.kompas.com/read/2015/10/31/10171421/Malaysia.Deportasi.183.TKI.Melalui.Nunukan> (diakses 20 Juni 2017).

⁵¹ “Malaysia deportasi 726 TKI bemasalah,” *Antara*, 12 Januari 2017, diakses 20 Juni 2017, <http://www.antarane.ws.com/berita/606388/malaysia-deportasi-726-tki-bemasalah>

⁵² “KJRI Sabah pulangkan mandiri 375 TKI,” *Antara*, 21 Maret 2017, diakses 20 Juni 2017, http://www.antarane.ws.com/berita/619506/kjri-sabah-pulangkan-mandiri-375-tki?utm_source=related_news&utm_medium=related&utm_campaign=news

⁵³ “Malaysia deportasi 43 TKI melalui Entikong,” *Antara*, 25 Maret 2017, diakses 20 Juni 2017, http://www.antarane.ws.com/berita/620266/malaysia-deportasi-43-tki-melalui-entikong?utm_source=related_news&utm_medium=related&utm_campaign=news

⁵⁴ “Malaysia Deportasi 132 TKI Ilegal, Biaya Pemulangan Dibebankan ke TKI,” *Kompas.com*, 27 Mei 2017, diakses 20 Juni 2017, <http://regional.kompas.com/read/2017/05/27/10063461/malaysia.deportasi.132.tki.legal.biaya.pemulangan.dibebankan.ke.tki>

⁵⁵ “Jokowi Akan Stop Pengiriman TKI,” *Kompas.com*, 14 Februari 2015, diakses 20 Juni 2017, <http://regional.kompas.com/read/2015/02/14/03274001/Jokowi.akan.Stop.Pengiriman.TKI>

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ “Penghentian Pengiriman TKI Bukan Solusi,” *Kompas.com*, 24 September 2010, diakses 20 Juni 2017, <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/09/24/1336137/Penghentian.Pengiriman.TKI.Bukan.Solusi>

⁵⁸ “Kepala BNP2TKI Beberkan 4 Modus Trafficking Penempatan TKI,” *Situs Resmi BNP2TKI*, 6 Januari 2015, diakses 20 Juni 2017, <http://www.bnp2tki.go.id/read/9760/Kepala-BNP2TKI-Beberkan-4-Modus-Trafficking-Penempatan-TKI>; Syamsuddin and Azlinda Azman, “Door to door cleaner”: A new variant of human trafficking in domestic sector,” *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 172 (2015): 405 – 410.

⁵⁹ “Bekalan amah: Berahil dari Indonesia?,” *Malaysia Kini*, 16 Juli 2015, diakses 20 Juni 2017, <http://m.malaysiakini.com/news/305304>

⁶⁰ “Malaysia iktiraf sumbangan pekerja asing bangunkan negara,” *Utusan Malaysia*, 5 Oktober 2013, diakses ke 20 Juni 2017, http://ww1.utusan.com.my/utusan/Dalam_Negeri/20131005/dn_34/Malaysia-iktiraf-sumbangan-pekerja-asing-bangunkan-negara

⁶¹ Wawancara, 14 Juni 2017.

⁶² Abubakar Eby Hara, “Hubungan Indonesia dan Malaysia: dari Saudara Serumpun ke ‘Smart Partnership’?,” paper presented at Seminar Internasional Indonesia-Malaysia Up Date, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia, 27-29 Mei, 2008.

⁶³ Bustami, Reevany, Karim, Azhari, Maksun, Ali, “Why are They Angry at Us: G-M-P Twin Matrixes and Indonesian-Malaysian Relations,” makalah dipresentasikan di 6th Indonesia-Malaysia Relations Conference, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia, 10-12 Juli 2012.

⁶⁴ *Buletin KJRI*, Edisi Januari-April, 2007, hal. 16.

⁶⁵ Nasrullah Ali Fauzi, *loc. cit.*

Daftar Pustaka

Ab. Latif, Wan Abdul Rahman Wan. “Kes Perburuhan dan Tuduhan Politik Tidak Jejas Hubungan: Malaysia-Indon Cipta Masalah?” *Jurnal Pemikir*, 67 (2012): 125-136.

Antara. “TKI ilegal masih marak, Malaysia deportasi lagi 3.622 orang via Nunukan.” *Antara*. Diakses 20 Juni 2017. <http://www.antaraneews.com/berita/589522/tki-ilegal-masih-marak-malaysia-deportasi-lagi-3622-orang-via-nunukan>

_____. “Malaysia deportasi 726 TKI bermasalah.” *Antara*, 12 Januari 2017. Diakses 20 Juni 2017. <http://www.antaraneews.com/berita/606388/malaysia-deportasi-726-tki-bermasalah>

_____. “KJRI Sabah pulangkan mandiri 375 TKI.” *Antara*, Diakses 20 Juni 2017. http://www.antaraneews.com/berita/619506/kjri-sabah-pulangkan-mandiri-375-tki?utm_source=related_news&utm_medium=related&utm_campaign=news

_____. “Malaysia deportasi 43 TKI melalui Entikong.” *Antara*, Diakses 20 Juni 2017. Dalam http://www.antaraneews.com/berita/620266/malaysia-deportasi-43-tki-melalui-entikong?utm_source=related_news&utm_medium=related&utm_campaign=news

BBC. “9 Malaysians held in North Korea arrive home.” *BBC*. Diakses 17 Juni 2017. <http://edition.cnn.com/2017/03/30/asia/kim-jong-nam-malaysia-north-korea/index.html>

BBC Indonesia. “Jokowi hapus Kartu tenaga kerja luar negeri.” *BBC Indonesia*, Diakses 12 Juni 2017. http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/11/141130_presiden_hapus_kartu_tenagakerja_luar_negeri

Berita Satu. “Migrant Care Nyatakan Prabowo Nimbrung di ‘Tikungan Terakhir’ Kasus TKI Wilfrida.” *Berita Satu*, 23 Juni 2014. Diakses 10

Juni 2017. <http://www.beritasatu.com/politik/192029-migrant-care-nyatakan-prabowo-nimbrung-di-tikungan-terakhir-kasus-ki-wilfrida.html>

_____. "Sejak Januari, 1.700 TKI NTB Dideportasi dari Malaysia." *Berita Satu*, 12 Oktober 2015. Diakses 15 Juni 2017. <http://www.beritasatu.com/nasional/313855-sejak-januari-1700-tki-ntb-dideportasi-dari-malaysia.html>

Buletin KJRI. Edisi Januari-April, 2007.

Bustami dan Reevany, Azhari Karim, Ali Maksum, "Why are They Angry at Us: G-M-P Twin Matrixes and Indonesian-Malaysian Relations." Makalah dipresentasikan di 6th Indonesia-Malaysia Relations Conference, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia, 10-12 July, 2012.

Caraka. "Menggapai Peluang, Hadapi Tantangan Untuk Dubes Baru." *Caraka* 42, no.12 (2012).

Detik. "Selain Alami Penyiksaan, TKW di Malaysia Ini Juga Dibuang Majikan ke Hutan." *Detik*, 23 April 2015. Diakses 8 Juni 2017. <http://news.detik.com/berita/2895732/selainalamipenyiksaantkwdimalaysiainijugadibuangmajikankehutan>

_____. "TKI Suyanti Disiksa di Malaysia, Pemerintah Layangkan Nota Protes." *Detik*, 27 Desember 2016. Diakses 8 Juni 2017. <https://news.detik.com/berita/d3381679/tkisuyantidisiksadimalaysiapemerintahlayangkannotaprotos>

Fauzi, Nasrullah Ali. Indonesia Dalam Pandangan Media Malaysia: Sebuah Kajian Awal. In Mohamad Redzuan Othman, Md Sidin Ahmad Ishak, Jas Laile S. Jaafar, Adrianus Meliala & Sri Murni (Eds.), *Setengah Abad Hubungan Malaysia-Indonesia* (pp. 479-496). Shah Alam: Arah Publications, 2009.

Harahap, Khairudin. Laman Group Pusat Konsultasi TKI, Diakses 6 Juli 2017.

https://www.facebook.com/search/str/Jika%2Bkebijakan%2Bini%2BBrasional%2Bkita%2Bdukung/keywords_posts?esd=eyJlc2kiJoiUzpfSTE1NDcxODA1MjQ6Vks6Njg4MTE3MDI4MDAxMjU0IiwicHNpZCI6eyIxNTQ3MTgwNTI0OjY4ODExNzAyODAwMTI1NCI6IlV6cGZTVEUxTkrjeE9EQTFNalE2VmtzNk5qZzRNVEUzTURJNE1EQXhNalUwIn0sImNyY3QiOiJ0ZXh0IiwieY3NpZCI6IjlyODViOTBkMzQyM2E2YzU0MjY4ZDIxYTc2MThlNDk5In0%3D

- Idris, Nor Azizan. Hubungan Malaysia-Indonesia dan Isu Pendatang Tanpa Izin. In Sity Daud & Zarina Othman (Eds.), *Politik dan Keselamatan*. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 2005.
- Iqbal, Muhammad & Arifin Zainal. *Tabap Kualiti Hidup Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia dan Faktor-Faktor Psikologikal Yang Mempengaruhinya*. Paper presented at the Persidangan Hubungan Malaysia-Indonesia, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 6-8 August, 2009.
- Kini News. "Suyanti , TKI Asal Medan Ini Disiksa Majikannya Di Malaysia." *Kini News*, Diakses 8 Juni 2017. <http://dunia.kini.co.id/2016/12/24/4206/suyantitkiasalmedaninidisiksamajikannyadimalaysia>
- Kompas.com. "Penghentian Pengiriman TKI Bukan Solusi." *Kompas.com*, 24 September 2010. Diakses 20 Juni 2017. <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/09/24/1336137/Penghentian.Pengiriman.TKI.Bukan.Solusi>
- _____. "TKW Disiksa di Malaysia, Gigi Dicabut dan Organ Vital Dirusak." *Kompas.com*, 25 Desember 2014, Diakses 8 Juni 2017. <http://regional.kompas.com/read/2014/12/25/22591691/TKW.Disiksa.di.Malaysia.Gigi.Dicabut.dan.Organ.Vital.Dirusak>
- _____. "Malaysia Deportasi 183 TKI Melalui Nunukan." *Kompas.com*, 31 Oktober 2015. Diakses 20 Juni 2017. <http://nasional.kompas.com/read/2015/10/31/10171421/Malaysia.Deportasi.183.TKI.Melalui.Nunukan>
- _____. "Jokowi Akan Stop Pengiriman TKI." *Kompas.com*, 14 Februari 2015. Diakses 20 Juni 2017. <http://regional.kompas.com/read/2015/02/14/03274001/Jokowi.akan.Stop.Pengiriman.TKI>
- _____. "Tindak Lanjuti Revisi UU Perlindungan TKI, Pemerintah Bentuk Badan Pelaksana Kebijakan." *Kompas.com*, 20 Maret 2017. Diakses 12 Juni 2017. <http://nasional.kompas.com/read/2017/03/20/21284141/tindak.lanjuti.revisi.uu.perlindungan.tki.pemerintah.bentuk.badan.pelaksana.kebijakan>
- _____. "Malaysia Deportasi 17.921 WNI Tahun 2016." *Kompas.com*, 18 Januari 2017. Diakses 20 Juni 2017. <http://nasional.kompas.com/read/2017/01/18/14211931/malaysia.deportasi.17.921.wni.tahun.2016>

- _____. "Malaysia Deportasi 132 TKI Ilegal, Biaya Pemulangan Dibebankan ke TKI." *Kompas.com*, 27 Mei 2017. Diakses 20 Juni 2017. <http://regional.kompas.com/read/2017/05/27/10063461/malaysia.deportasi.132.tki.illegal.biaya.pemulangan.dibebankan.ke.tki>
- Koran Sindo. "3 TKI Asal Sukabumi Disekap Dalam Pabrik di Malaysia." *Koran Sindo*, 5 September 2014. Diakses 8 Juni 2017. <https://daerah.sindonews.com/read/898500/21/3tkiasalsukabumidisekapdalamabrikdimalaysia1409887646>
- Liow, J. C. *Malaysia's Approach to Its Illegal Indonesian Migrant Labour Problem: Securitization, Politics, or Catharsis?*. IDSS-FORD Workshop on Non-Traditional Security In Asia. Singapore: S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, 2004.
- _____. *The Politics of Indonesia-Malaysia Relations: One Kin, Two Nations*. London: Routledge Curzon, 2005.
- Liputan 6. "TKI Asal Kupang Disiksa Majikan di Malaysia." *Liputan 6*, 24 Desember 2014. Diakses 8 Juni 2017. <http://global.liputan6.com/read/2152093/tkiasalkupangdisiksamajikandimalaysia>
- _____. "1 TKW Dianiaya di Malaysia, Diduga Korban Perdagangan Orang." *Liputan 6*, 31 Desember 2015. Diakses 8 Juni 2017. <http://news.liputan6.com/read/2402080/1tkwdianiyadimalaysiadidugakorbanperdaganganorang>
- Maksum, A. & R. Bustami. The 1965 coup and reformasi 1998: two critical moments in Indonesia-Malaysia relations during and after the Cold War. *SpringerPlus*, vol. 3, no.45 (2014). doi: 10.1186/2193-1801-3-45
- Malaysia Kini. "Bekalan amah: Beralih dari Indonesia?" *Malaysia Kini*, 16 Juli 2015. Diakses 20 Juni 2017. <http://m.malaysiakini.com/news/305304>
- Merdeka.com. "Hukum mati WNI, Malaysia nyatakan perang lawan narkoba." *Merdeka.com*, 2 Maret 2015. Diakses 15 Juni 2017. <https://www.merdeka.com/dunia/hukum-mati-wni-malaysia-nyatakan-perang-lawan-narkoba.html>
- Migrant Care. "Rapor Merah Pemerintahan SBY-JK, Dalam Agenda Perlindungan terhadap Buruh Migran Indonesia di Luar." Jakarta: Migrant Care, 2009. Diakses 4 Februari 2013. <http://www.migrantcare.net/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=6&artid=678>

- Okezone. "Malaysia Siap Deportasi 50.000 TKI." *Okezone*, 8 Desember 2014. Diakses 15 Juni 2017. <http://news.okezone.com/read/2014/12/07/337/1075886/malaysia-siap-deportasi-50-000-tki>
- _____. "TKW Indonesia Disebut "Binatang" dan Disiksa di Malaysia." *Okezone*, 24 Desember 2016. Diakses 8 Juni 2017. <http://news.okezone.com/read/2016/12/24/18/1574897/tkwindon-esiadisebutbinatangdandisiksadimalaysia>
- _____. "Pukat UGM: Satgas Saber Pungli Belum Maksimal." *Okezone*, 16 Januari 2017. Diakses 12 Juni 2017. <http://news.okezone.com/read/2017/01/16/510/1592667/pukat-ugm-satgas-saber-pungli-belum-maksimal>
- _____. "Pasutri Malaysia Ditahan karena Diduga Aniaya TKI hingga Tewas." *Okezone*, 27 Februari 2017. Diakses 8 Juni 2017. <http://news.okezone.com/read/2017/02/27/18/1629398/pasutrima-laysiaditahankarenadidugaaniayatkihinggatwas>
- _____. "Diduga Bunuh TKW Asal Indonesia, Suami-Istri di Malaysia Dicidaduk." *Okezone*, 1 Maret 2017. Diakses 8 Juni 2017. <http://news.okezone.com/read/2017/03/01/18/1630838/didugabu-nuhtkwasalindonesiasuamiistrimalaysiadicidaduk>
- Pusat Sumber Daya Buruh Migran. "TKI Masih Diperas karena Tak Miliki KTKLN." *Pusat Sumber Daya Buruh Migran*, 2 Desember 2014. Diakses 12 Juni 2017. <https://buruhmigran.or.id/2014/12/02/tki-masih-diperas-karena-tak-miliki-ktkln/>
- Republika. "Menaker Lepas Pemulangan 383 TKI Ilegal dari Malaysia." *Republika*, 20 Desember 2014. Diakses 20 Juni 2017. <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/12/20/ngv3gk-menaker-lepas-pemulangan-383-tki-ilegal-dari-malaysia>
- RMOL. "Malaysia Deportasi 1.904 TKI Ke Kalbar Sepanjang Tahun 2015." *RMOL*, 2 Januari 2016. Diakses 20 Juni 2017. www.rmol.co/read/2016/01/02/230220/Malaysia-Deportasi-1.904-TKI-Ke-Kalbar-Sepanjang-Tahun-2015
- Hanani, Silfia. *Sosio-Kultural Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia*. Paper presented at the Persidangan Hubungan Malaysia-Indonesia, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 6-8 August, 2009.
- Senja, Pipiet (ed.). *Seronok Negeri Jiran: Antologi Kisah WNI di Malaysia*. Jakarta: Yayasan Budan Hadijah, 2015.

- Sinar Harapan. "Ajeng Yulia, WNI Terpidana Kasus Narkoba Menanti Eksekusi Mati." *Sinar Harapan*, 28 Februari 2015. Diakses 15 Juni 2017. <http://www.tribunnews.com/nasional/2015/02/28/ajeng-yulia-wni-terpidana-kasus-narkoba-menanti-eksekusi-mati>
- _____. "Pemerintah Upayakan Pembebasan Ajeng Yulia." *Sinar Harapan*, 4 Maret 2015. Diakses 15 Juni 2017. <http://www.sinarharapan.co/news/read/150304094/pemerintah-upayakan-pembebasan-ajeng-yulia-b-b->
- _____. "Pengiriman TKI ke Malaysia Sistem Satu Pintu." *Sinar Harapan*, 17 Maret 2015. Diakses 15 Juni 2017. <http://www.sinarharapan.co/news/read/150317025/pengiriman-tki-ke-malaysia-sistem-satu-pintu>
- Situs Resmi BNP2TKI. "Kepala BNP2TKI Beberkan 4 Modus Trafficking Penempatan TKI." *Situs Resmi BNP2TKI*, 6 Januari 2015. Diakses 20 Juni 2017. <http://www.bnptki.go.id/read/9760/Kepala-BNP2TKI-Beberkan-4-Modus-Trafficking-Penempatan-TKI>
- _____. "Sepanjang 2014 BNP2TKI Mencatat Penempatan TKI 429.872 Orang." *Situs Resmi BNP2TKI*, 16 Januari 2015. Diakses 8 Juni 2017. <http://www.bnptki.go.id/read/9800/Sepanjang2014BNP2TKIMencatatPenempatanTKI429.872Orang.html>
- _____. "BNP2TKI: Majikan Harus Dihukum, dan TKI Suyanti Mendapatkan Keadilan." *Situs Resmi BNP2TKI*, 27 Desember 2016. Diakses 8 Juni 2017. <http://www.bnptki.go.id/read/11955/BNP2TKI:MajikanHarusDihukumdanTKISuyantiMendapatkanKeadilan.html>
- Syamsuddin dan Azlinda Azman. " "Door to door cleaner": A new variant of human trafficking in domestic sector." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 172 (2015): 405 – 410.
- Tribun Medan. "Dituduh Mencuri, Seorang TKI Terekam Video Disiksa dan Dicambuk di Malaysia." *Tribun Medan*, 22 Februari 2016. Diakses 13 Juni 2017. <http://medan.tribunnews.com/2016/02/22/dituduh-mencuri-seorang-tki-terekam-video-disiksa-dan-dicambuk-di-malaysia>
- Utusan Malaysia. "Malaysia iktiraf sumbangan pekerja asing bangunkan negara." *Utusan Malaysia*, 5 Oktober 2013. Diakses 20 Juni 2017. http://ww1.utusan.com.my/utusan/Dalam_Negeri/20131005/dn_34/Malaysia-iktiraf-sumbangan-pekerja-asing-bangunkan-negara

- _____. "Siapa Siti Aisyah?." *Utusan Malaysia*, 17 Februari 2017. Diakses 17 Juni 2017. <http://www.utusan.com.my/berita/nasional/siapa-siti-aisyah-1.445666>
- _____. "Kes pembunuhan Kim Jong-nam: 16 Jun ditetapkan untuk pengurusan kes." *Utusan Malaysia*, 8 Juni 2017. Diakses 17 Juni 2017. <http://www.utusan.com.my/berita/mahkamah/kes-pembunuhan-kim-jong-nam-16-jun-ditetapkan-untuk-pengurusan-kes-1.490953>
- VOA Indonesia. "Pemerintah akan Hentikan Pengiriman TKI Sektor Informal Secara Bertahap." *VOA Indonesia*, 25 Februari, 2015. Diakses 10 Juni 2017. <https://www.voaindonesia.com/a/pemerintah-akan-hentikan-pengiriman-tki-sektor-informal-secara-bertahap/2657994.html>
- Wan Hassan, Wan Shawaluddin dan Zaini Othman. "Ketidakstabilan Negara Jiran dan Kesannya kepada Keselamatan Malaysia." *Sosiohumanika* vol. 2, no. 1 (2009): 59-74.
- Wawancara. 13 Juni 2017.
- _____. 14 Juni 2017.
- Yulyadi, L. Hubungan Dinamik Antara Indonesia dan Malaysia Pasca Merdeka: Peranan Faktor "Co-Religio" Dalam Hubungan Dua Hala. In Mohamad Redzuan Othman, Md Sidin Ahmad Ishak, Jas Laile S. Jaafar, Adrianus Meliala & Sri Murni (Eds.), *Setengah Abad Hubungan Malaysia-Indonesia* (pp. 359-371). Shah Alam: Arah Publications, 2009